

ETOS KERJA BANGSA JEPANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR

PITRI HARYANTI, RETNO PURWANI SARI, SONI MULYAWAN SETIANA
Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Sastra
Universitas Komputer Indonesia

The issue of flood management policies serves polemics in public discourse with no consistency of risk management policies; the arguments continue. As a result, this phenomenon leads to the fact that a technology alone cannot answer the challenges of management risk, and public work projects are promoted to address those challenges. As behaviourist's saying, "mind determines attitude", one of essential public work projects is related to a change of people's mind by learning from others' experiences. The manipulation of Indonesian's mind through learning Japanese's mind is considered as a focus of this research. The research itself aims to examine Japanese indigenous culture to assist Indonesian in identifying and applying its own indigenous culture. Conducting the research, analytic descriptive qualitative approach is applied comprehensively. Analyzing the cases, the research shows that Japanese moral etiquette, bushido, and its indigenous culture are implemented to formulate flood management policies. Government, private companies, and citizens work together to manage the risk.

Keywords : Japanese's ethos, flood, management policies

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banjir telah menjadi fenomena alam yang biasa dan sering terjadi di Indonesia setiap musim hujan pada setiap tahunnya. Tetapi sayangnya kejadian banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun tidak diikuti dengan tindakan-tindakan pencegahan ataupun penanggulangan yang signifikan. Ketika banjir datang berulang, misalnya di Jakarta, pemerintah kota yang seharusnya memiliki kemampuan antisipasi, pencegahan, serta penanganan yang makin baik dan canggih dari waktu ke waktu pada kenyataannya tidak lebih sigap dan cekatan. Kondisi ini diperparah dengan peran dan sumbangsih pihak swasta dan masyarakat yang justru memperburuk

keadaan. Pembangunan mall, villa atau resort-resort yang tidak mengindahkan lingkungan, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan atau ke sungai sehingga menyumbat drainase, sudah menjadi suatu yang membudaya dan menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu sudah seyogyanya dalam menangani masalah banjir ini tidak hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat.

Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di Jepang. Jepang, dengan kondisi geografisnya yang hampir 70% merupakan daerah pegunungan dengan aliran sungai curam dan jarak ke laut yang pendek, mengharuskan Jepang berhadapan dengan

banjir ketika terjadi curah hujan tinggi. Tingginya curah hujan di Jepang disebabkan oleh "Taifu atau taifun" dan pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini yang menyebabkan ketidakstabilan iklim tidak hanya di Jepang tetapi juga di seluruh Negara di bumi ini. Faktor penyebab banjir di Jepang berbeda dengan di Indonesia karena banjir di Jepang umumnya terjadi karena meluapnya air dari sungai karena curah hujan tinggi. Dengan kata lain banjir di Jepang bukan karena bukti kegagalan pemerintah dan masyarakat Jepang dalam memelihara, mengelola dan melakukan konservasi lingkungan tetapi lebih kepada kondisi alamnya.

Menghadapi kondisi seperti itu setiap tahunnya, Jepang tidak diam dan berpangku tangan. Pemerintah dengan kontrol dan manajemen yang meningkat setiap saat dan kesadaran masyarakatnya dalam menjaga ekologi dan keseimbangan alam yang tinggi membuat kerugian akibat banjir dapat berkurang dari tahun ke tahun. Jepang yang memiliki alat-alat canggih dengan teknologi tinggi memang perlu ditiru tetapi, lebih dari itu budaya Jepang baik pemerintah maupun masyarakatnya untuk menanganani banjir juga perlu dicontoh. Karena di Indonesia terutama di Jakarta, masalah banjir disebabkan tidak hanya oleh kondisi alam tetapi juga oleh karena pola pikir dan budaya kerja pemerintah kota yang penuh dengan korupsi dan kolusi, pola pikir pihak swasta yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan keseimbangan alam dan juga pola pikir dan budaya masyarakatnya yang tidak pernah menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan berpikir kebersihan kota dan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Dengan pola pikir dan budaya pemerintah kota, pihak swasta ataupun masyarakat Indonesia yang seperti itu, meskipun teknologi secanggih *crosswave* dibeli dengan harga tinggi oleh pemerintah Indo-

nesia maka semua itu akan sia-sia. Oleh karena itu, selain kita meniru teknologi dari Jepang, perlu juga bagi pemerintah maupun masyarakat kita untuk dapat bercermin dari pola pikir dan budaya masyarakat Jepang.

Berdasarkan dari asumsi tersebut, tema yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **Penanggulangan Banjir di Jepang Ditinjau dari Aspek Budaya**. Dengan harapan, kita semua bisa tersadar perlunya memelihara nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang sudah mulai terkikis untuk membangun negeri tercinta kita Indonesia. Karena Jepang pun bisa menjadi Negara yang maju tidak lain karena mereka mampu mempertahankan nilai-nilai luhur, kearifan lokal mereka di tengah-tengah zaman modern ini.

Mengkaji permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah dapat dibuat sebagai berikut: (1) Bagaimana pola pikir pemerintah Jepang dalam penanggulangan banjir di Jepang, (2) Bagaimana pola pikir pihak swasta Jepang dalam penanggulangan banjir di Jepang, dan (3) Bagaimana pola pikir masyarakat Jepang dalam penanggulangan banjir di Jepang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan konsep penelitian dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif karena hasil analisis dari penelitian ini tidak ditransformasi dalam bentuk angka tetapi berupa pemaparan dalam bentuk naratif mengenai penanggulangan banjir di Jepang ditinjau dari pola pikir dan budaya pemerintah, pihak swasta dan masyarakatnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka baik dari buku-buku referensi ataupun melalui media cyber. Tidak hanya itu pengumpulan data pun akan dilakukan dengan menghubungi pemerintah kota di Jepang yang pernah dilanda banjir di antaranya, Kyushu, Tokyo dan Tohoku, pihak swasta dalam hal ini beberapa pabrik di Jepang dan beberapa orang Jepang se-

bagai sumber data baik melalui surat ataupun media elektronik berhubungan dengan tema penelitian. Sebelum menentukan tema, penulis telah melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul yaitu mengenai penanganan banjir baik di Indonesia maupun di Jepang. Hasil analisis studi pendahuluan penulis tertarik untuk meneliti mengenai penanggulangan banjir di Jepang dilihat dari aspek budaya. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis lapangan model Spradley yaitu analisis taksonomi dimana data akan dijabarkan lebih terperinci untuk mengetahui struktur internalnya dengan observasi terfokus.

TEMUAN PENELITIAN

1. Banjir di Jepang dan Penanganannya

Penanggulangan banjir di Jepang berada di bawah koordinasi Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transport (MLIT), di mana untuk tiap wilayah (region) ada departemen khusus pengawasan sungai dan wilayah-wilayah alirannya (*river administrator*). Sedangkan pada saat terjadi bencana, yang menjadi koordinatonya adalah Kementerian dalam negeri dan komunikasinya (MIAC) dan Kementerian negara khusus manajemen bencana. Untuk riset banjir sendiri, Jepang mempunyai pusat riset masalah kebumiharian dan penanggulangan bencana (NIED, *National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention*). Di bawahnya ada subsenter yang meneliti banjir dan longsor. Atau untuk aspek perencanaan, NILIM (*National Institute for Land and Infrastructure Management*) juga eksis dengan perencanaan-perencanaan lingkungan terkait, seperti sungai, dam, dan perencanaan pengkoordinasian saat bencana. Khusus untuk banjir kota, Kyoto University di bawah DPRI (*Disaster Prevention Research Institute*) memiliki laboratorium khusus yang meneliti masalah bagaimana mengontrol banjir di kota tersebut. Di beberapa universitas pun terdapat laboratorium yang memiliki ketertarikan terhadap

riset banjir, termasuk di DCRC (*Disaster Control Research Center*) yang berada di Universitas Tohoku (Roychansyah; 2007).

Setiap tahunnya, Jepang menjadi langganan banjir. Dan faktor penyebab banjir itu sendiri lebih dikarenakan posisi geografisnya yang mengharuskan berhadapan dengan curah hujan tinggi. Tidak hanya itu Jepang pun merupakan Negara yang setiap tahunnya diterjang angin topan atau *Taifu* yang datang dari selatan, kemudian menyapu daratan Jepang ke utara. Sehingga Jepang sudah berpengalaman berhadapan dengan banjir sejak dari dulu dan undang-undang tentang sungai (river law) pun sudah dibuat pada zaman Meiji (1896). Namun pemerintah mulai menetapkan sebuah sistem langkah-langkah pencegahan bencana banjir dengan diberlakukannya undang-undang tindakan darurat pengendalian banjir dan erosi pada tahun 1960 setelah rentetan bencana seperti badai topan Makurazaki (1945), topan Kathleen (1947), banjir di Kyushu (1953) dan Topan Ise Bay (1959) yang merupakan bencana banjir paling hebat yang pernah terjadi dalam sejarah Jepang, melanda Jepang. Rentetan badai topan berskala besar tersebut menimbulkan kerusakan besar dan semakin memperburuk Jepang yang pada saat itu sedang mengalami krisis pangan setelah kekalahan pada PD II.

Pada akhir tahun 1950-an sampai tahun 1960, Jepang bergerak dari Negara industri primer menjadi industri sekunder. Dan perubahan struktural industri terjadi dari tahun 1960 sampai 1970-an yang menyebabkan Jepang bergerak ke industri tertier. Perubahan tersebut berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi juga mengakibatkan urbanisasi, kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan air sehingga krisis air yang parah menjadi isu besar di daerah perkotaan dan industri baru. Masalah krisis air bersih ini diperburuk dengan adanya kekeringan yang terjadi pada musim panas tahun 1963, yaitu tahun dimana Olimpiade pertama diselenggarakan di Asia. Pada waktu itu,

bandungan Oguchi di sungai Tama yang menyediakan air bersih untuk lebih dari setengah wilayah Tokyo mengalami kekeringan seiring dengan penurunan jumlah curah hujan sejak tahun 1961 dan menyebabkan permintaan akan air bersih pada waktu itu meningkat. Akibat dari permintaan air bersih secara nasional yang terjadi pada tahun 1960-an tersebut, pemerintah merevisi undang-undang sungai pada tahun 1964 dengan menambahkan pembangunan Sumber air bersih sebagai fokus utama.

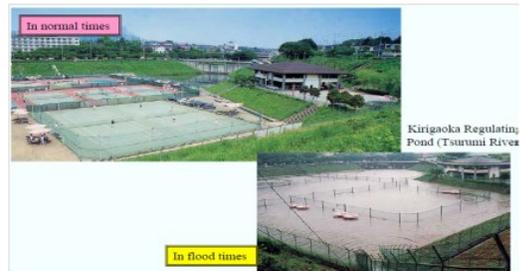
Pembangunan sungai dan bendungan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan alami, terutama ekosistem sungai. Ekstensifnya pembangunan sungai dan konstruksi bendungan yang merusak lingkungan sebagai respon terhadap banjir hebat dan krisis air bersih yang terjadi pada periode sebelumnya, telah memicu kepedulian masyarakat. Masyarakat menjadi secara aktif ikut serta dalam pergerakan untuk menjaga kelestarian dan ekosistem sungai. Sehingga pada tahun 1997, pemerintah merevisi Undang-undang sungai dengan menambahkan konservasi lingkungan dan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan pencegahan dan penanggulangan banjir.



Gambar 1. Keterlibatan masyarakat sesuai revisi UU Sungai 1997
Sumber Masahiro;2013

Pembangunan selalu menghasilkan jenis baru dari kerusakan banjir karena urbanisasi yang aktif. Beberapa tipe baru dari kerusakan banjir muncul di daerah kota yang awalnya sawah yang berperan sebagai waduk alami selama musim hujan. Selain

itu, seiring dengan pembangunan infrastruktur bawah tanah di wilayah kota sejak tahun 1990, menyebabkan infrastruktur yang ada di bawah tanah sering membanjiri Tokyo dan Fukuoka di utara Kyushu setelah tahun 1999. Oleh karena itu pada tahun 2001, pemerintah merevisi tindakan pencegahan banjir dengan membangun area yang berfungsi sebagai waduk/penyimpan air ketika banjir terjadi.



Gambar 2. Lapangan tenis yang berfungsi sebagai penyimpanan air ketika banjir
Sumber Terakawa; 2011

Perubahan iklim yang drastis pada masa sekarang ini, menuntut Jepang untuk siap menghadapi jenis banjir lain yang disebabkan oleh iklim yang tidak stabil. Oleh karena itu peraturan undang-undang pencegahan banjir pada tahun 2007 sampai berfokus pada perbaikan system dalam penyediaan informasi banjir.

2. Pola Pikir dan Budaya

Manusia memandang sesuatu dari sisi dan cara yang berbeda. Perbedaan ini dipicu dengan adanya kenyataan bahwa mereka menetap di tempat yang berbeda dengan lingkungan alam dan sosial yang berbeda pula. Setiap lingkungan sosial ini menuntut setiap individu sosial berperilaku dan berpikir tertentu. Prilaku dan pemikiran inilah yang menjadi cikal bakal dari kebudayaan. Dengan adanya fakta tersebut

(Continued from page 6)

Hofstede, G. mendefinisikan kebudayaan sebagai,

The position that the ideas, meanings, beliefs and values people learn as members of society determines human nature. People are what they learn. Optimistic version of cultural determinism place no limits on the abilities of human beings to do or to be whatever they want. Some anthropologists suggest that there is no universal "right way" of being human. "Right way" is almost always "our way"; that "our way" in one society almost never corresponds to "our way" in any other society. Proper attitude of an informed human being could only be that of tolerance. (1997: 1)

Kebudayaan, dalam pengertian ini, tidak berhenti dengan pemahaman akan perilaku dan cara berpikir. Kebudayaan juga melibatkan kepercayaan individu sosial terhadap Tuhannya serta pandangan politik yang dipelajari dan dijalankannya. Nilai-nilai tersebut lah yang menentukan nilai kemanusiaan seseorang dalam suatu masyarakat.

Benar atau tidaknya suatu nilai ditentukan oleh cara setiap masyarakat menjalani kehidupan bermasyarakatnya. Oleh sebab itu, sangat lah wajar jika ditemukan begitu banyak perbedaan yang dimiliki antar masyarakat; masyarakat hidup dengan nilai dan caranya sendiri termasuk memandang benar atau tidaknya suatu masalah.

Bertolak dari pemahaman tersebut di atas, kebudayaan yang mencerminkan pola pikir dan cara masyarakat berperilaku akan berbeda bagi setiap negara. Indonesia dan Jepang merupakan negara tetangga yang tak luput dari perbedaan ini. Akan tetapi, perbedaan ini bukan lah isu yang musti dipertentangkan, melainkan alternatif pembelajaran dalam bermasyarakat dan

berbudaya termasuk kearifan lokal negara Jepang dalam mengatasi masalah banjir yang dihadapinya.

3. Budaya dan Pola Pikir Orang Jepang

Pada zaman dahulu, masyarakat Jepang sebenarnya tidak jauh dari masyarakat Indonesia yaitu masyarakat agraris. Pada masa budaya padi atau "*kome no bunka*" orang Jepang hidup berkelompok. Dan mereka menjaga hubungan baik antar anggota kelompoknya agar panen yang dihasilkan melimpah. Sering mereka mengorbankan kepentingan atau keinginan pribadi yang bisa merusak kepentingan umum. Sehingga dapat dikatakan tidak masalah minum bersama kalau hal tersebut akan mendorong kerukunan di komunitasnya.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, kelompok-kelompok kecil itu pun kemudian berkembang menjadi besar dan batas menjaga kerukunan di dalam komunitasnya pun semakin melebar menjadi desa, kota, bahkan negara. Pada masa pemerintahan samurai Jepang mengenal adanya *bushidou*. Konsep *bushido* terbentuk pada zaman Kamakura yang mengadopsi paham Neo konfusianisme pada zaman Edo yang kemudian *bushidou* ini menjadi dasar moral bangsa Jepang setelah restorasi Meiji. "*Bushidou involved not only martial spirit and skill with weapons, but also absolute loyalty to one's lord, a strong sense of personal honor, devotion to duty, and the courage, if required, to sacrifice one's life in battle or in ritual*" (*Bushidou*, 1983, hal ; 221). Dengan pola pikir *Bushidou* dimana orang Jepang sangat loyal terhadap pemerintah bahkan rela mati demi Negara menjadi dasar moral yang kuat dalam membangun bangsanya.

Tidak hanya *Bushidou*, orang Jepang juga mengenal yang namanya *gambari* atau *gambatte*, yang sekarang ini sedang ngetrend lewat iklan sebuah produk minuman. *Gambatte* sendiri asal kata dari *gambaru*. *Gambatte* merupakan bentuk untuk menye-

mangati seseorang, seperti “Do your best!”. Sedangkan *gambaru* biasanya jawaban dari *gambatte* yang berarti “saya akan berusaha sebaik mungkin”. Dari budaya ini lahirlah konsep bahwa untuk mendapatkan sesuatu, orang Jepang harus bekerja keras sehingga terbentuklah pola pikir, bekerja keras merupakan hal yang positif. Dan apabila orang Jepang akan memasuki masa pensiun mereka akan kebingungan karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Sehingga tidak ada ucapan “*happy retirement*” di antara orang Jepang.

Di luar kedua pola pikir dan konsep dasar dari budaya dan pola pikir masyarakat Jepang masih banyak lagi, budaya-budaya yang tetap mereka pertahankan seperti, *giri* (kewajiban sosial orang Jepang), pandangan orang Jepang tentang Tuhan, alam dan sebagainya yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang.

4. Pola Pikir Pemerintah

Pendekatan budaya merupakan esensi dari cara penanggulangan banjir di Jepang. Artinya, penguatan dan penelaahan atas landasan konseptual yang mendasari cara penanggulangan banjir menjadi faktor fundamental yang mendasari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jepang, sebagai negara yang menganut paham *confusionisme*, menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpegang pada seperangkat gagasan etika yang mengedepankan ikatan tradisional berupa tanggung jawab etis (*dōtoku*). Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan menyeluruh dalam berkehidupan bermasyarakat; individu tidak pernah dapat terlepas dari komunitasnya. Hal ini dimaknai, setiap diri rakyat Jepang memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan dan komunitasnya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu,

masyarakat Jepang memegang teguh dan mengimplementasikan semangat *bushidō* (baca *the way of the warrior*, jalan ksatria). *Bushidō* merepresentasikan sistem etika dan aturan moral ksatria yang dulunya berlaku di kalangan samurai, dan kini sistem etika *bushidō* diyakini sebagai petunjuk kehidupan dan sudah menjadi pola pikir masyarakat Jepang.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Jepang berpegang pada gagasan etika berupa tanggung jawab etis untuk menjalani kehidupan yang baik sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama manusia, serta sebagai penjaga dan pemelihara lingkungan – yang implementasinya diwujudkan dengan sistem etika *bushidō* terlepas dari peran individu di dalam masyarakat, apakah dirinya seorang pemimpin pemerintahan, pihak swasta, ataupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, gagasan etika berupa tanggung jawab etis dan *bushidō* sudah menjadi pola pikir masyarakat Jepang secara keseluruhan.

Berikut ini adalah pola pikir pemerintah Jepang dalam kaitannya dengan fungsi dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang memegang tanggung jawab pemerintahan serta bertugas membangun dan menjaga kesejahteraan masyarakat Jepang melalui kebijakan dan pengaturan penanggulangan banjir, khususnya. Dalam hal ini, pemerintah menempatkan dirinya sebagai abdi negara, pemimpin, dan pemelihara kesejahteraan masyarakat.

Peran pihak swasta dalam membangun negaranya tidak hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi, tetapi juga masa *recovery* setelah bencana. Bersama pemerintah dan warga masyarakat, bahu membahu membangun Jepang agar pulih dari dampak bencana. Berikut adalah paparan pola pikir pihak swasta terhadap pemerintah, dirinya dan lingkungannya.

a. Melakukan Perannya sebagai Warga Negara yang Baik

Berkenaan dengan undang-undang sungai, selain mentaati undang-undang yang sudah ditetapkan, pihak swasta juga berperan aktif sebagai pelaku dan kontrol produktif undang-undang tersebut. Apabila mempelajari sejarah perjalanan Jepang, dipahami bahwa undang-undang sungai terus mengalami pembaharuan seiring dengan pengalaman-pengalaman bangsanya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, undang-undang perairan tidak bersifat mapan. Artinya undang-undang sungai mengalami perubahan dan peninjauan ulang terhadap kelemahan setiap undang-undang yang diterapkan. Pihak swasta dalam hal ini berkontribusi dalam hal pemikiran dalam diskusi sebelum undang-undang ditetapkan. Sistem penetapan perundang-undangan di Jepang, sebagaimana yang disebutkan OECD (2006), dimulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan pemerintah sebagai pihak yang menentukan kebijakan. Pemerintah membuat sistem dan kebijakan penanganan bencana banjir dengan melalui observasi dan penelitian yang menyeluruh dengan melibatkan pakar-pakar terkait. Namun, undang-undang sungai tidak langsung ditetapkan, melainkan melewati proses diskusi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat, terutama yang berada di daerah sungai tersebut; *dangō*. Pemerintah pusat membuat undang-undang yang bersifat umum, sementara undang-undang khusus yang disesuaikan dengan situasi setempat, dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan masukan pihak swasta dan masyarakat. Dengan kata lain, pihak swasta berkontribusi secara aktif dalam penentuan undang-undang sungai di Jepang.

Kontribusi konkrit lain pihak swasta terhadap penanggulangan bahaya banjir

dimanifestasikan melalui ketaatan kepada ketetapan pemerintah berupa penyediaan fasilitas evakuasi di kantor atau di tempat bekerja, dan membuat sistem penyelamatan dokumen-dokumen penting sesuai yang dianjurkan pemerintah. Dalam hal ini, pihak swasta bertanggung jawab bukan hanya menunjukkan integritas (*gi*) pada pemerintah, tetapi juga mewujudkan bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Sebagaimana yang dipaparkan Hamid (2006: 100), sikap dan penilai orang Jepang terhadap sikap dan perilaku sangat lah ketat. Mereka beranggapan bahwa moral manusia dapat dinilai oleh setiap orang. Dengan demikian, ketidakmampuan mengemban tanggung jawab sebagai warga negara merupakan hal terburuk yang bisa terjadi pada diri masyarakat Jepang. Akibatnya, pihak swasta berupaya keras memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemerintah dan negaranya.

Karena masyarakat Jepang termasuk pihak swasta memegang etika budaya malu (*haji*), tujuan hidup mereka adalah berbuat baik secara moral dan etika yang berlaku di daerahnya. Perbuatan baik ini diperlihatkan juga ketika pihak swasta menerima proyek pembuatan bendungan ataupun terowongan sebagai upaya pencegahan banjir. Pihak swasta yang ditunjuk untuk membangun bendungan tersebut akan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dengan melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya dengan memegang tinggi nilai kejujuran (*shin*). Mereka menyadari bahwa meskipun tidak ada yang tahu kecurangan yang dilakukan, Tuhan, bumi, langit, dan diri sendiri tahu. Dengan demikian, mereka sangat menghindari sikap yang tidak bertanggung jawab.

b. Membantu Negeranya Ketika dalam Kehancuran

Sejak dulu orang Jepang telah diajarkan dan dibiasakan melakukan kebajikan, mengabdikan pada pekerjaan dan hidup untuk menjalani peraturan. Mereka menghormati konstitusi

dan tidak bergantung pada siapa dan bagaimana figur pemimpin mereka. Pola pikir tersebut terefleksikan ketika mereka bergabung ke kelompok yang disebut perusahaan.

“Always respect the Constitution and observe the laws; should emergency arise offer yourselves courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our imperial Throne coeval with heaven and earth. So shall yet not only be our good and faithful subjects, but render illustrious the best tradition of your fore fathers.”

Emperor Meiji- October 30, 1890

Orang Jepang memiliki perasaan *longing* and *belonging* yang tinggi sehingga merasa bahwa negara merupakan keluarga dan rekan dalam bisnis. Di Jepang antara pihak swasta dan negara saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dalam perekonomian Jepang sehingga Jepang menjadi salah satu negara terkuat dalam perekonomian dunia.

Ketika negaranya dilanda bencana banjir, pihak swasta baik secara individu atau secara asosiasi dalam badan yang disebut NGO (*non government organization*) turut membantu negaranya baik berupa materi maupun tenaga sukarela yang terjun langsung membantu ke daerah bencana. Sebagaimana yang dilakukan perusahaan telepon di Jepang, NTT dan NHK yang menjadi media pelayanan masyarakat cuma-cuma; mengesampingkan keuntungan dan popularitas untuk sementara waktu ketika negaranya dilanda bencana banjir.

5. Pola Pikir Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

Masyarakat Jepang mengetahui bahwa banjir yang terjadi di negaranya karena kondisi alam Jepang bukan sepenuhnya karena *human error* atau pun karena

ketidakmampuan atau kesalahan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan ataupun pihak swasta. Dengan pemahaman seperti itu, masyarakat merasa mengatasi banjir bukan kewajiban pemerintah ataupun pihak swasta, tetapi kewajiban mereka juga. Oleh karena itu masyarakat Jepang mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mencegah banjir dan berusaha membantu terlaksananya upaya-upaya tersebut. Berikut ini pola pikir masyarakat terhadap penanggulangan banjir di Jepang.

Masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang *group oriented*, yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan/keharmonisan kelompok daripada kepentingan individu sehingga mematuhi nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku dalam kelompoknya merupakan suatu keutamaan. Loyalitas terhadap kelompoknya menghasilkan perasaan solidaritas dan konsep dasar dari *shūdan ishiki* atau kesadaran berkelompok.

Dengan *shūdan ishiki* yang dimiliki oleh orang Jepang, mereka menyadari bahwa mereka merupakan anggota dari sebuah Negara yang disebut Jepang dan dengan berpijak pada kesadaran tersebut, mereka memahami akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara

A Japanese person is a member of many groups. The largest group is the country itself, the group of all Japanese people. The Japanese mindset also focuses heavily on obligations.

(Lebowitz, 2013)

Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana banjir, masyarakat senantiasa mentaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah baik itu yang bersifat pencegahan, ketika bencana terjadi ataupun *recovery* setelah bencana.

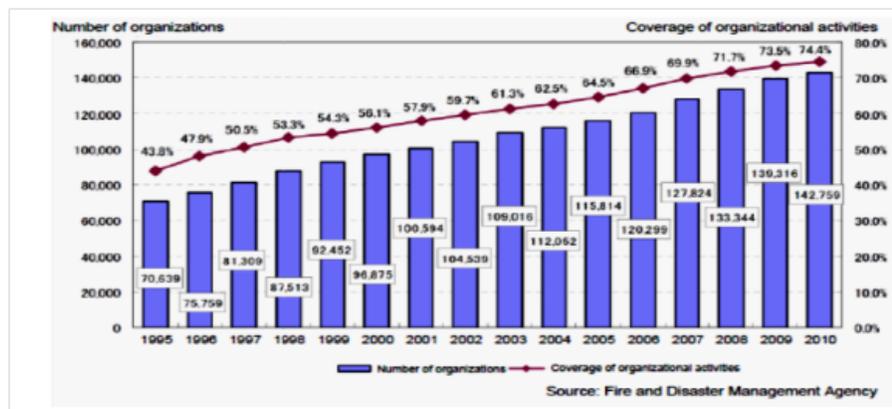
Dalam usaha pemerintah mencegah banjir dengan membangun bendungan di sekitar area sungai pada tahun 1945, penduduk yang tinggal di area tersebut rela pindah meskipun kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pada waktu itu kurang layak dan kekurangan dari kompensasi itu dibayarkan lima tahun setelahnya yaitu pada tahun 1950. Namun dari peristiwa tersebut, terlihat jelas sifat loyalitas orang Jepang kepada Negara yang melebihi logika sehingga mereka rela berkorban apapun untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Di Jepang, terutama di daerah yang sering terkena bencana, baik banjir, tsunami ataupun gempa biasanya terdapat *hazard map* (peta pengungsian) dan masyarakat di daerah tersebut diberikan buku panduan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dan biasanya pemerintah daerah bekerja sama dengan *local community* men-

adakan latihan/simulasi ketika bencana terjadi. Dalam pelatihan tersebut kebanyakan warga ikut serta secara aktif. Walaupun ada yang tidak dapat berpartisipasi kebanyakan karena alasan sakit atau darurat lainnya yang tidak bisa dihindari. (Motoyoshi, 2012)

Rasa percaya kepada pemerintah yang tinggi membuat orang Jepang tidak menyalahkan pemerintah ketika banjir terjadi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Motoyoshi, 2006. Dalam penelitian tersebut, kebanyakan orang Jepang menyatakan bahwa resiko banjir merupakan tanggung jawab mereka sendiri bukan tanggung jawab pemerintah.

Dalam proses recovery pun tanpa diminta tenaga-tenaga sukarela seperti *Voluntary Disaster Management Organization, Bokomi, Kaekko* dan sebagainya selalu siap membantu guna menciptakan negara



Gambar 3. Jumlah *local community* dari tahun 1995-2010

Jepang dengan mekanisme penanggulangan banjir yang dapat diandalkan. Malahan, setiap tahunnya, *local community* terus bertambah.

Meskipun masyarakat Jepang percaya kepada pemerintah, tetapi bukan berarti tidak

kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kritis kepada pemerintah tidak berdasarkan pada ego semata tetapi terhadap kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Seperti yang terjadi pada tahun 1972, ketika hujan lebat menyebabkan banjir yang parah secara nasional, banyak korban banjir menggugat pemerintah akan

ketidak mampuan mereka mengelola sungai. Dalam beberapa kasus, warga sebagai penggugat, mengklaim bahwa beberapa wilayah berulang kali banjir atau debit air dari bendungan disinyalir berkontribusi dalam meningkatnya banjir di daerah hulu sungai. Warga menggugat pengelola sungai karena ketidakmampuan dan kecacatan mereka dalam mengelola sungai.

KESIMPULAN

Bangsa Jepang dikenal bukan hanya sebagai negara maju, mereka pun memiliki budaya kedisiplinan yang sangat tinggi, menghormati alam dengan menjaga kelestariannya, mengikuti atau patuh terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintahnya.

Pendekatan budaya merupakan esensi dari cara penanggulangan banjir di Jepang. Artinya, penguatan dan penelaahan atas landasan konseptual yang mendasari cara penanggulangan banjir menjadi faktor fundamental yang mendasari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jepang, sebagai negara yang menganut paham confusianisme, menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpegang pada seperangkat gagasan etika yang mengedepankan ikatan tradisional berupa tanggung jawab etis (*dōtoku*). Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan menyeluruh dalam berkehidupan bermasyarakat; individu tidak pernah dapat

terlepas dari komunitasnya. Hal ini dimaknai, setiap diri rakyat Jepang memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan dan komunitasnya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu, masyarakat Jepang memegang teguh dan mengimplementasikan semangat *bushidō* (baca *the way of the warrior*, jalan ksatria). *Bushidō* merepresentasikan sistem etika dan aturan moral ksatria yang dulunya berlaku di kalangan samurai, dan kini sistem etika *bushido* diyakini sebagai petunjuk kehidupan dan sudah menjadi pola pikir masyarakat Jepang.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Jepang berpegang pada gagasan etika berupa tanggung jawab etis untuk menjalani kehidupan yang baik sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama manusia, serta sebagai penjaga dan pemelihara lingkungan - yang implementasinya diwujudkan dengan sistem etika *bushidō* terlepas dari peran individu di dalam masyarakat, apakah dirinya seorang pemimpin pemerintahan, pihak swasta, ataupun anggota masyarakat. Dengan kata lain, gagasan etika berupa tanggung jawab etis dan *bushidō* sudah menjadi pola pikir masyarakat Jepang secara keseluruhan.

Pemerintah menempatkan pihak masyarakat dan swasta sebagai rekanan dalam menyelesaikan masalah banjir. Penanggulangan bencana banjir bukan saja tugas pemerintah, melainkan tugas bersama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Jepang..

DAFTAR PUSTAKA

- Azra. (2007) *Banjir dan Politik*. Kompas 12 Februari 2007
- Bushidou.(1983).*Koudansha Encyclopedia of Japan* .Tokyo;Kodansha
- CB Rao. (2009). The Japanese Bussiness Mindset. <http://cbrao2008.blogspot.com/2009/10/japanese-business-mindset-enigmatic-but.html>
- Davies & Osamu (2002), *The Japanese Mind*, Turtle Time
- Dasiah Anwar, Siti. (2004). *Cara Berpikir Orang Jepang Sebuah Perspektif Budhisme*. Makara, Sosial Humaniora Vol.8 No.3
- Fatah. (2007). *Bersahabat dengan Banjir*. Harian Kompas 05 Februari 2007
- Haryanti Pitri (2013). *All about Japan*. Andi. Yogyakarta
- Haraguchi & Lall. (2013). *Flood Risk and Impacts Future Research Question and Implication to Private Investment Decision Making for Supply Chain Network*.
- Masahiro. (2013). *Comprehensive Urban River Basin Management in Japan*.
- Lebowitz, *The Japanese Mindset*, 2013
- Masato Seiji, *Nihon ni Okeru Kyouzui Higai no Genjo to taisaku*, kokudo Koutsu Shou Kawagawakyouchou
- Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Heisei 23. *Kisha Happyou Shiryō*.
- Morita (2011). *Nihonjin no Kokoro ga Wakaru Nihongo*. Asuku Shuppan
- Motoyoshi. (2006). *Public Perception of Flood Risk and Community- Based Disaster Preparedness*. OECD. (2006). *Japan Floods*
- River Bureau of the MILT. (1999). *Recent Flood Control Issues in Japan and Legislation for Preventing Flood Damages in Urban Areas*.
- Robert S. Ozaki *The Japanese A Cultural Portrait*, The Japanese Time 1990
- Robert M.March. *Reading The Japanese Mind, The Realities behind their thoughts and action*, Kodansha 1996
- Rochansyah. (2007). *Jepang Mengakrabi Banjir*.<http://saniroy.archiplan.ugm.ac.id/?p=332>
- Subagijo. (2007) *Banjirpolitikan dalam Mistisisme Politik*. Bisnis Indonesia 08 Februari 2007
- Takahashi. (2011). *Flood Management in Japan During The Last Half Century*. www.lkyspp.nus.edu.sg/iwp
- Tanaka Shigenobu. (2008). *Local Disaster Management and Hazard Mapping*. ICHARM
- Terakawa. (2011). *Integrated Flood Management for Urbanized River Basins in Japan*.
- Wahid. (2007) *Bursa Cagub DKI Pasca Banjir*. Suara Pembaharuan 18 Februari 2007
- Wibisono. (2007) *Politik Banjir Metropolitan*. Suara Pembaharuan 12 Februari 2007

